

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Wukirsari

Secara geografis, Desa Wukirsari merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Desa Wukirsari merupakan desa yang terletak berada di lereng pegunungan Kendeng dan memiliki batas wilayah yaitu:¹

- a. Sebelah Utara: Desa Sinomwidodo
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Winong, Kabupaten Pati
- c. Sebelah Selatan: Desa Maitan dan Desa Pakis
- d. Sebelah Barat: Desa Larangan

Desa Wukirsari terletak diantara 111°04 dan 111°06 Bujur Timur dan antara 6°54 dan 6°91 Lintang Selatan. Desa Wukirsari juga memiliki wilayah seluas 622 Ha. Desa Wukirsari berjarak 8 km dari Kecamatan Tambakromo dan 23 km dari Kabupaten Pati. Secara administrasi Desa Wukirsari terdiri dari 3 dukuh dengan pembagian wilayah yaitu:²

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Desa Wukirsari

No.	Nama Dukuh	Nama dan Jumlah RW	Nama dan Jumlah RT
1.	Semak	1 (1)	1, 2 (2)
2.	Gayam	2 (1)	1, 2, 3, 4 (4)
3.	Gares	3 (1)	1, 2 (2)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Wukirsari terdiri dari 3 dukuh yaitu Semak, Gayam, dan Gares. Dukuh Semak terletak di RW 1 dan terdiri dari 1 RW (Rukun Warga) dan 2 RT (Rukun Tetangga). Kantor Pemerintah Desa Wukirsari sendiri terletak di Dukuh Semak RT 1 RW 1. Kemudian Dukuh Gayam terletak di RW 2 terdiri dari 1 RW dan 4 RT, dan terakhir Dukuh Gares yang terletak di RW 3 dan terdiri dari 1 RW dan 2 RT.

¹ BKKBN, "BKKBN Desa Wukirsari," 2021, 2021, <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11444/wukirsari>.

² Hasil observasi pembagian wilayah di Desa Wukirsari, 25 Januari 2024.

2. Demografi Desa Wukirsari

Desa Wukirsari memiliki jumlah penduduk sebanyak 1674 jiwa dengan laki-laki sebanyak 840 jiwa dan perempuan sebanyak 834 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, penduduk di Desa Wukirsari dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³

Tabel 4.2
Klasifikasi Usia Penduduk Desa Wukirsari

No.	Rentang Usia (Tahun)	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan
1.	0-4	50	46
2.	5-9	56	44
3.	10-14	45	58
4.	15-19	57	43
5.	20-24	60	70
6.	25-29	64	62
7.	30-34	67	69
8.	35-39	59	64
9.	40-44	62	61
10.	45-49	51	60
11.	50-54	60	67
12.	55-59	60	65
13.	60-64	68	43
14.	65-69	28	28
15.	70-74	19	15
16.	75+	34	39
Jumlah Total		840	834

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui terkait dengan usia rata-rata penduduk di Desa Wukirsari. Menurut Permenkes Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan diterangkan kategori usia balita yaitu 1-5 tahun, anak-anak usia 6-10 tahun, remaja adalah usia 10-19 tahun, Pasangan Usia Subur (PUS) yaitu 15-49 tahun, dewasa yaitu usia 19-44 tahun, pra lanjut usia adalah usia 45-59 tahun, dan lanjut usia yaitu usia 60 tahun keatas. Jumlah balita di Desa Wukirsari yaitu 50 balita laki-laki dan 46 balita perempuan. Kemudian untuk kategori anak-anak yaitu 56 anak laki-laki dan 44 anak perempuan. Sedangkan jumlah penduduk dengan kategori remaja yaitu ada 102 remaja laki-laki dan 101 remaja perempuan. Lalu jumlah PUS di Desa Wukirsari yaitu 420 laki-

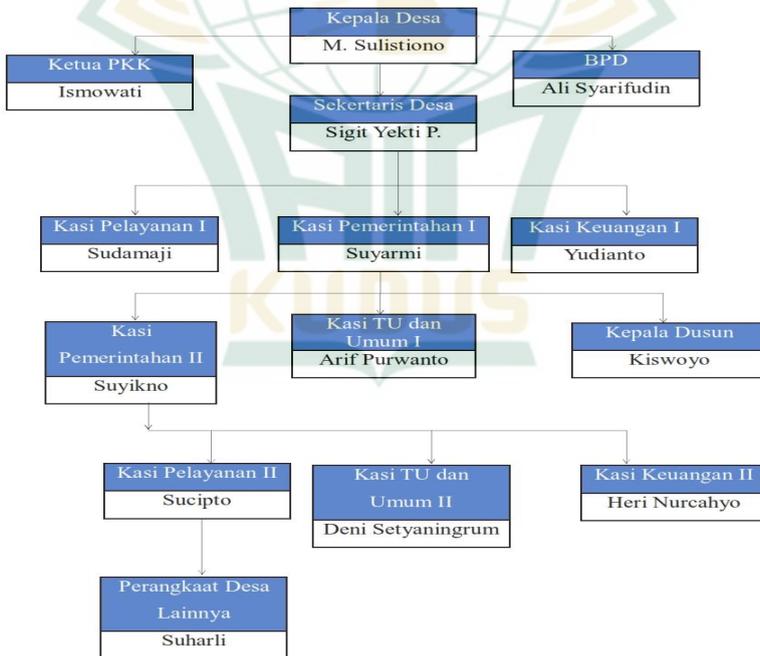
³ BKKBN, "BKKBN Desa Wukirsari."

laki dan 429 perempuan. PUS terdiri dari kelompok masyarakat usia remaja hingga dewasa. Kemudian jumlah penduduk usia dewasa yaitu 312 laki-laki dan 319 perempuan. Jumlah pra lansia yaitu 171 laki-laki dan 192 perempuan. Jumlah lansia yaitu 149 laki-laki dan 125 perempuan.

Implementasi kesetaraan gender di Desa Wukirsari dapat disosialikan dan diterapkan mulai pada kategori usia anak-anak hingga pra lansia. Adapun kategori PUS yang mencapai 50% dari jumlah penduduk di Desa Wukirsari menjadi pemeran utama dalam implementasi kesetaraan gender di Desa Wukirsari. Oleh karena itu, Pemerintah Desa melalui PKK dan bidan desa gencar melaksanakan sosialisasi kerumah-rumah calon pengantin. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi terkait pra nikah dan pasca nikah salah terkait peran-peran suami dan istri yang menjunjung kesadaran kesetaraan gender.

3. Struktur Organisasi Desa Wukirsari

**Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Desa Wukirsari**



Adapun tugas dan wewenang Pemerintah Desa Wukirsari yaitu :⁴

- a. Kepala Desa mempunyai tugas melaksanakan Pemerintahan Desa, menjalankan pembangunan Desa, membina dan memberdayakan masyarakat Desa. Adapun wewenang Kepala Desa yaitu:
 - 1) Memimpin terselenggaranya Pemerintahan Desa;
 - 2) Melantik dan memberhentikan perangkat Desa;
 - 3) Menetapkan Peraturan Desa dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa);
 - 4) Mengembangkan dan mengusulkan sumber pendapatan desa, dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Sekertaris Desa memiliki tugas yaitu:
 - 1) Menyusun program kerja tahunan Desa;
 - 2) Menjalankan pembinaan dan administrasi ketatausahaan Pemerintah Desa;
 - 3) Mengoordinasi kegiatan yang dilaksanakan perangkat desa;
 - 4) Mengoordinasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masa akhir jabatan Kepala Desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang beranggotakan penduduk desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayahnya secara demokratis. Adapun tugas BPD lainnya yaitu:
 - 1) Melaksanakan musyawarah Desa;
 - 2) Menerima laporan dari Kepala Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan disetiap akhir tahun anggaran;
 - 3) Memberitahukan kepada Kepala Desa terkait akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis pada 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

- 4) Menyampaikan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 5) Menerima laporan nama calon Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati;
 - 6) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - 7) Mengusulkan, membahas, dan menyepakati Peraturan Desa, APBDes, dan pengelolaan kekayaan milik Desa bersama Kepala Desa;
 - 8) Memantau berbagai keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - 9) Ikut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan sosialisasi program pembangunan dari Bupati.
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) mempunyai tugas antara lain:
- 1) Ikut dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, perencanaan, dan pembangunan;
 - 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - 3) Mengembangkan dan menumbuhkan gerakan gotong royong, partisipasi, dan swadaya masyarakat untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan;
 - 4) Meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- e. Kasi Keuangan memiliki tugas yaitu:
- 1) Mengatur kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan belanja desa, serta tanggungjawab atas penggunaan keuangan yang sudah dikeluarkan;
 - 2) Menyusun laporan dibidang keuangan dan melaksanakan evaluasi keuangan Pemerintah Desa.
- f. Kasi Pelayanan mempunyai tugas antara lain:
- 1) Membina dan melakukan pelayan dibidang keagamaan, kematian, kesehatan, pernikahan, keluarga, dan pendidikan masyarakat;
 - 2) Membantu dalam kegiatan pemberdayaan Karang taruna, Pramuka, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
- g. Kasi TU dan Umum memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Menjalankan tugas-tugas bidang adminitrasi dan umum;
 - 2) Menjalankan urusan rumah tangga Pemerintah Desa;
 - 3) Melaksanakan kegiatan rapat, dinas, dan upacara;
 - 4) Mengatur urusan surat menyurat dan kearsipan.

- h. Kasi Pemerintahan mempunyai tugas yaitu:
 - 1) Melakukan pengelolaan data pemerintahan;
 - 2) Membantu tugas dalam penarikan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
 - 3) Membantu dalam pengawasan pelaksanaan pemilihan umum;
 - 4) Ikut menjalankan tugas dalam bidang agraria, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil;
 - 5) Menyusun laporan dibidang pemerintahan.
- i. Kepala Dusun memiliki tugas yaitu:
 - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan, dan ketertiban, serta ketenteraman masyarakat di wilayahan kerjanya.

B. Deskripsi Data

1. Implementasi *Gender Equality* dalam Program dan Kebijakan Pemerintah Desa Wukirsari

Implementasi kesetaraan gender memiliki arti tindakan untuk mewujudkan keadaan yang sama atau setara terhadap perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan serta hak sebagai manusia agar dapat berpartisipasi dan ikut terlibat dalam politik, pembangunan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keamanan, dan pertahanan, serta menikmati hasil yang sama atas pembangunan tersebut.⁵ Implementasi kesetaraan gender di Pemerintahan Indonesia telah ditetapkan Pemerintah ke dalam bidang hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Di Desa Wukirsari sendiri, telah mengimplementasikan kesetaraan gender melalui berbagai program dan kebijakan desa. Terwujudnya kesetaraan gender di Desa Wukirsari membutuhkan peran dari Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat Desa Wukirsari. Berdasarkan wawancara dengan para responden, implementasi kesetaraan gender telah dilaksanakan melalui beberapa program dan kebijakan desa. Namun, implementasi kesetaraan gender di Desa Wukirsari dapat dikatakan masih jauh dari kata maksimal karena perbedaan

⁵ Rizki and Hanum, "Quo Vadis Gender Mainstreaming Policy to Fight Against the Prevalence of Gender-Based Violence in Indonesia."

tingkat pendidikan masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah Desa bersama BPD dan PKK berusaha untuk mendorong implementasi kesetaraan gender melalui berbagai strategi-strategi dalam advokasi pengarusutamaan gender. Implementasi kesetaraan gender di Desa Wukirsari secara sederhana dapat dilihat dari peranan perangkat desa perempuan di Pemerintahan Desa Wukirsari. Menurut keterangan Bapak M. Sulistiono selaku Kepala Desa di Desa Wukirsari peranan perempuan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah efektif. Seperti dalam keterangan Bapak Sulistiono yang menyatakan bahwa,

“Peranan perangkat desa perempuan untuk masalah mengemban tugas dan wewenang sudah efektif, karena sudah dibagi ke dalam kasi pelayanan, pembangunan, kesejahteraan, dan lainnya.”⁶

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Suyikno selaku Kasi Pemerintahan II, beliau mengatakan bahwa,

“Upaya kesetaraan gender memang diharuskan, setidaknya di Pemerintahan Desa, dari kabupaten pun menganjurkan ada sepertiga persennya. Kan misal tiga banding satu, setidaknya misal laki-laki enam perempuan dua gitu. Setidaknya itu memang ada seharusnya memang seperti itu. Jadi, memang sudah diterapkan seperti itu. Lha nyatanya disini sudah ada dua. Beberapa perangkat disini memang ada perempuan dan laki-laki ya spertiganya. Ya memang belum ada tapikan sudah mengikuti prosedur. Termasuk Pemilu kemarin ternyata ndak laki-laki aja, ternyata dari apa KPPS ternyata ya ada perempuan ada.”⁷

Berdasarkan keterangan Bapak Suyikno dapat diketahui bahwa jumlah perangkat perempuan di Pemerintahan Desa Wukirsari belum memenuhi presentase 30% dari seluruh perangkat yang ada. Meskipun demikian, upaya melibatkan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat Desa maupun nasional sudah diupayakan dan

⁶ M. Sulistiono, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2024, wawancara 1, transkrip.

⁷ Suyikno, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2024, wawancara 2, transkrip.

direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa dan masyarakat mendukung peraturan terkait kebijakan keterlibatan perempuan dalam Pemilu 2024 yaitu pada keanggotaan KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara).

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Sigit Yekti Prasetyo selaku sekretaris Desa, beliau menuturkan bahwa,

“Untuk jumlah perangkat desa perempuan hanya dua dari sebelas perangkat desa, belum memenuhi. Kalo dari regulasi pendaftaran perangkat tidak ada regulasi PUG atau pengarusutamaan gender, jadi yang bisa menjadi perangkat kan bebas kemarin, ndak harus perempuan. Jadi, tidak mengutamakan PUG. Kalo yang terbaru kemungkinan kalo ada pendaftaran ya harus mengikuti itu aturan yang terbaru, kalo dulu belum.”⁸

Berdasarkan keterangan Bapak Sigit dapat diketahui bahwa tidak terpenuhinya kuota perempuan dalam Pemerintah Desa diakibatkan karena regulasi pendaftaran perangkat desa yang tidak mencantumkan aturan pengarusutamaan gender. Regulasi masih bersifat bebas dimana tidak ada kuota tertentu untuk laki-laki dan perempuan, sehingga perangkat desa laki-laki jumlahnya lebih banyak dibanding perempuan yaitu 9 orang. Apabila dalam regulasi sudah diterapkan terkait pengarusutamaan gender, ada kemungkinan bahwa kuota keterlibatan perempuan akan sampe pada angka 30%. Sehingga implementasi kesetaraan gender dalam struktur Pemerintah Desa Wukirsari akan lebih terealisasikan.

Bapak Sigit kemudian juga menambahkan terkait dengan peran perangkat perempuan di Desa Wukirsari. Beliau menuturkan bahwa,

“Peran perangkat desa perempuan memiliki kelebihanannya, dia lebih rajin. Terus perempuan juga kita membutuhkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan perempuan yang tidak mungkin perangkat laki-laki untuk kegiatan. Perempuan sangat membantu untuk melaksanakan kegiatan desa yang ada perempuannya, contoh sosialisasi balita, stunting, posyandu. Seperti RT 1 RW 1 ini kan kegiatan bank

⁸ Sigit Yekti Pasetyo, wawancara oleh penulis, 27 Januari, 2024, wawancara 3, transkrip.

sampah sudah mulai berjalan, harapannya juga bisa berjalan di RT RT yang lainnya. Bank sampah ibu-ibu yang menginisiasi itu.”⁹

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sigit dapat dilihat bahwa perangkat desa perempuan dinilai lebih rajin daripada laki-laki. Perangkat desa perempuan juga memegang peran yang cukup penting terutama dalam permasalahan anak-anak. Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang merupakan program dari pemerintah yang melibatkan masyarakat perempuan juga menjadi lebih mudah disosialisasikan oleh perangkat desa perempuan, sebagai contoh yaitu pelaksanaan program bank sampah.

Implementasi kesetaraan gender di Desa Wukirsari terutama dilihat dari sudut pandang jumlah perempuan dalam pemerintahan dapat dikatakan belum maksimal. Pemerintah Desa bersama dengan kelompok PKK berupaya melakukan strategi-strategi implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan. Advokasi pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan strategi pembinaan dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satu bentuk advokasi pengarusutamaan gender diungkapkan oleh Bapak Ali selaku ketua BPD Desa Wukirsari yang mengatakan bahwa,

“Kalau kami dari pihak BPD, selalu mendorong setiap ada kegiatan tentu harus terlibat ya , harus ada keterlibatan kesetaraan gender agar sama-sama bekerja. Dan biasanya yang masih belum terealisasi dengan baik yaitu program pembangunan. Karena program pembangunan yang kaitannya dengan fisik itu selama ini masih didominasi oleh kaum laki-laki karena urusannya membangun fisik ya infrastruktur itu kan jarang sekali melibatkan perempuan. Mungkin hanya di kepanitiaanpun itu pun tidak maksimal begitu.”¹⁰

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ali dapat dilihat bahwa implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender sudah dilaksanakan dengan menekankan keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan

⁹ Sigit Yekti Pasetyo, wawancara oleh penulis, 27 Januari, 2024, wawancara 3, transkrip.

¹⁰ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

yang ada di desa, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun keterlibatan perempuan dalam pembangunan ini belum maksimal, tetapi sudah ada upaya dari Pemerintah Desa untuk melibatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan sebagai bagian kepanitiaan.

Usaha dalam mengimplementasikan kesetaraan gender juga dilaksanakan oleh PKK sebagai lembaga pemberdayaan keluarga. Bu Ismowati sebagai Ketua PKK menyatakan bahwa advokasi pengarusutamaan gender sudah dilaksanakan PKK sejak 2021 dengan mendesak Pemerintah Desa mengganggarkan dana untuk program-program pelatihan, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Saya jadi ketua ditahun 2021 itu kami masih menggunakan yang RAB dulu, kemudian untuk musrem tahun 2021 untuk RAB tahun 2022 kami usulkan ada pelatihan kue. Tetapi belum di acc taun itu, karena masih untuk fisik dan BLT, BLT kan banyak sekali ya mbak berapa persen itu, sehingga pelatihan dipending. Kemudian kami usul, apa namanya pembuatan pelatihan pembuatan batik ecoprint seperti itu ternyata tidak di acc. Ternyata usulan saya yang dulu yang pembuatan kue atau katering itu di acc tahun ini mbak. Jadi, 2024 ini di acc.”¹¹

Berdasarkan pernyataan Ibu Ismowati dapat diketahui bahwa dalam upaya mengimplementasikan kesetaraan gender, beliau mengupayakan dalam setiap kegiatan Musrembangdes untuk diadakan program pelatihan-pelatihan yang dapat memberikan ketrampilan baru kepada masyarakat khususnya ibu-ibu. Pelatihan yang sudah diusulkan sejak 2021 ternyata baru mendapat persetujuan pada 2024 karena anggaran masih fokus pada infrastruktur dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Hal ini memberikan perspektif bahwa pengarusutamaan gender di Desa Wukirsari masih terkendala dana.

Hal tersebut sependapat dengan pernyataan dari Bapak Sulistiono selaku Kepala Desa Wukirsari yang menyatakan bahwa implementasi kesetaraan gender telah dilaksanakan di Desa Wukirsari, tetapi terkait dengan program dan kebijakan desa tetap akan dipilih yang paling urgensi.

¹¹ Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

“Dalam mengupayakan kesetaraan gender kita memaksimalkan setiap Kadus untuk menyerap aspirasi warganya dan memberikan kepada setiap RT untuk mengajukan 2 program pembangunan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhannya, termasuk juga kebutuhan perempuan. Kemudian kita akan mengambil yang paling emergensi untuk selanjutnya di tetapkan dalam APBDes, supaya pembangunan merata tanpa ada kesenjangan.”¹²

Berdasarkan keterangan Bapak Sulistiono dapat dilihat bahwa kesetaraan gender dalam kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan menyerap aspirasi masyarakat dalam lingkup tiap RT. Setiap RT akan diberikan kesempatan untuk mengajukan 2 program pembangunan yang dibutuhkan baik laki-laki maupun perempuan.

Sependapat dengan Bapak Sulistiono, implementasi kesetaraan gender dalam penyaringan aspirasi oleh BPD juga sudah dilaksanakan, sebagai Ketua BPD Pak Ali mengatakan bahwa,

“Dalam penyaringan aspirasi, kalau menyaring aspirasi perempuan kita ambilnya menggunakan selama ini ya yang sering masuk kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah membagi kewilayahan. Jadi, kewilayahan kami BPD itu ada lima anggota, dua perempuan dan tiga laki-laki sudah dibagi menjadi wilayah masing-masing. Biasanya mereka menyampaikan aspirasi itu ketempat-tempat BPD terdekat, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga membuka layanan online untuk pengaduan, usulan-usulan itu. Biasanya disampaikan ke BPD ya. Jadi, ya hal-hal seperti itu misalnya ada suatu kepanitiaan kegiatan kayak Pemilu gitu kan, oh ini banyak juga yang perempuan yang harus ikut. Nah, biasanya ada usulan pak ini kok didominasi laki-laki gitu ya, itu baru kita sampaikan kepada Pemerintah Desa. Tentu melalui kewenangannya, tidak semua itu bisa

¹² M. Sulistiono, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2024, wawancara 1, transkrip.

dilakukan melalui kewenangan BPD untuk menyampaikannya.”¹³

Berdasarkan keterangan Bapak Ali dapat diketahui bahwa dalam menjaring aspirasi masyarakat, BPD melaksanakannya dalam masing-masing kewilayahan BPD dan melalui online. Hal ini bertujuan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat terserap dan terealisasikan dengan baik. Menjaring aspirasi menjadi penting dalam proses implementasi kesetaraan gender, karena terserapnya aspirasi masyarakat yang merata akan memberikan keadilan pada seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun perempuan tidak dilibatkan secara aktif dalam pembangunan infrastruktur, aspirasi perempuan dalam pembangunan tetap ditampung dan direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bu Ismowati bahwa:

“Pada waktu musrem 2021 kami mengusulkan lapangan karena di Gayam sudah ada, kami juga mengusulkan untuk di Semak dan Gares. Hal ini sesuai kebutuhan karena sudah banyak tim voli. Kemudian dibangun lapangan voli di Semak di belakang TK. Kalau di Gares itu terkendala lahan. Kami juga usul ke Pemerintah Desa, dari Pemerintah Desa itu kalo ada lahannya bisa atau akan dianggarkan, tetapi karena memang lahan itu milik perhutani kami juga baru proses izin. Kami juga mengusulkan fasilitas olahraga lainnya tidak hanya voli tetapi olahraga lainnya agar pemuda pemudi itu aktifnya bisa ke olahraga atau ke hal-hal yang positif. Karena sekarang dampak dari digitalisasi atau hp sangat menyebabkan dampak yang buruk.”¹⁴

Berdasarkan pemaparan Bu Ismowati, dapat dilihat bahwa aspirasi perempuan dalam infrastruktur lapangan voli telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa. Pembangunan lapangan voli menurut Bu Ismowati cukup penting sebagai sarana olahraga masyarakat Desa. Adanya fasilitas olahraga seperti lapangan voli diharapkan dapat meningkatkan

¹³ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

¹⁴ Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

produktifitas masyarakat khususnya remaja dalam bidang olahraga.

Implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender juga dilakukan Pemerintah Desa dalam kegiatan musrembangdes. Pemerintah Desa mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi secara vokal dalam musyawarah musrembangdes. Menurut penuturan Bapak Sulistiono mengatakan bahwa,

“Kami sebagai Pemerintah Desa mendorong peran perempuan dalam musrembang. Kebetulan di BPD ada cewe, diapun ikut mengajukan. Kemudian kelompok PKK juga memiliki ide-ide yang disampaikan dengan melihat potensi usaha di wilayah RTnya masing-masing, seperti pengolahan limbah rumah tangga. Hal ini akan menjadi potensi untuk meningkatkan PAD di Desa Wukirsari juga. Karena untuk BUMDes kita juga baru mendirikan gedungnya, tetapi masih terkendala dibagian staf, waktu, dan usaha yang aka dijalankan. Sehingga untuk hal ini kita sangat mengharapkan peran dari perempuan untuk meningkatkan PAD.”¹⁵

Berdasarkan pemaparan Bapak Sulistiono, dapat dilihat bahwa melalui advokasi pengarusutamaan gender dalam musrembangdes, perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Partisipasi perempuan akan lebih memudahkan terserapnya kebutuhan masyarakat pada setiap wilayah RT. Partisipasi perempuan juga penting dalam meningkatkan pendapatan desa karena peran perempuan begitu dibutuhkan dalam menjalankan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).

Sependapat dengan Bapak Sulistiono, Ibu Ismowati juga menuturkan bahwa,

“Usulan perempuan dalam musrembang kalo menurut saya ditampung. Kemudian misalkan ada program, proram di tahun 2024, PKK memprogramkan apa kita sampaikan ke pemdes seperti pelatihan nanti kalo usula kita di acc ya kita jalankan. Karena PKK ingin punya pemasukan secara mandiri, dan menjadi PKK yang

¹⁵ M. Sulistiono, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2024, wawancara 1, transkrip.

mandiri sehingga tidak menggantungkan sumber dana dari desa.”¹⁶

Berdasarkan keterangan Ibu Ismowati dapat disimpulkan bahwa musrembangdes menjadi salah satu sarana dalam advokasi pengarusutamaan gender. Melalui musrembangdes, seluruh aspirasi masyarakat dapat langsung didengar oleh Pemerintah Desa. Program-program yang dapat meningkatkan implementasi gender akan ditampung, sehingga dapat direalisasikan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, akan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Program-program Desa akan dapat terealisasi dan tepat sasaran. Selain itu, dengan mengimplementasikan kesetaraan gender akan meningkatkan kemandirian baik lembaga maupun masyarakat desa. Hal ini juga dituturkan oleh Bapak Ali yang menyatakan bahwa,

“Perempuan memiliki peran penting dalam BUMDes, seperti ada memang tahun kemarin juga ada. Jadi, misalnya kan kita kemarin bikin usaha pakan ternak nah itu yang jaga mesti perempuan. Karena kalo laki-laki ngga mungkinlah jaga dengan penghasilan misalnya sekian dalam satu bulan itukan yang memungkinkan adalah dari wanita ya itupun mungkin dia yang sudah dia ibu-ibu rumah tangga. Jadi ya tidak bergantung pada itu sekor. Banyak sekali sebenarnya jadi kemarin itu kita mapping dari gas LPG, kemudian ada makanan ringan. Disampingnya BUMDes itukan ada cucian rencananya. Cucian kendaraan, itu kan sektor-sektor yang sebenarnya sudah bisa dikerjakan oleh wanita misalnya jaga makanan, cucian jaga tokonya gitu kan itu sangat memungkinkan.”¹⁷

Berdasarkan keterangan Bapak Ali, diketahui bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) Wukirsari berusaha untuk mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan BUMDes. Perempuan terutama ibu-ibu rumah tangga didorong

¹⁶ Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

¹⁷ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan dalam rumah tangga dengan melibatkannya dalam pengelolaan BUMDes. Implementasi kesetaraan gender melalui BUMDes akan memberikan keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.

Selain melalui keikutsertaan perempuan dalam BUMDes, Bu Ismowati juga memaparkan bahwa:

“Peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan di Desa kami itu ada dipokja satu, itu biasanya ada program gotong royong itu salah satunya merawat fasilitas desa. Membersihkan lingkungan seperti gotong royong membersihkan parit, karena jalan kalo paritnya tidak dibersihkan nanti bisa rusak. Jadi, peran kita dibagian itu gotong royong perdawis untuk membersihkan failitas desa, seperti juga melakukan perawatan dilapangan yang biasanya digunakan voli.”¹⁸

Berdasarkan pernyataan Bu Ismowati dapat dilihat bahwa dalam pembangunan berkelanjutan di Desa, perempuan memiliki peran secara langsung dalam kegiatan merawat fasilitas umum di Desa. Kegiatan gotong royong dilakukan oleh masing-masing PKK perdawis atau perRT bersama dengan masyarakat. Selain membersihkan parit atau selokan, PKK bersama perempuan desa juga merawat lapangan voli yang ada di masing-masing dukuh. Perawatan fasilitas ini sebagai bagian dari upaya kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dibidang infrastruktur.

Implementasi kesetaraan gender di Desa Wukirsari juga sudah dilakukan melalui program dan kebijakan Pemerintah Desa. Bapak Sulistiono juga menuturkan bahwa implementasi kesetaraan gender di Desa Wukirsari dilaksanakan melalui program-program yang diberikan PPK. Beliau mengatakan bahwa,

“Penerapan kesetaraan gender dalam kebijakan desa sudah dimulai, adanya program pemantauan kesenjangan melalui PPK, dengan meningkatkan antusias perempuan khususnya ibu-ibu yang umurnya sendiri setara dengan anggota PPK. Untuk kebijakan terkait kesetaraan gender sementara kami masih ikut

¹⁸ Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

kebijakan dari atas seperti program stunting dan program keluarga berencana.”¹⁹

Melalui pemaparan Bapak Sulistiono dapat dilihat bahwa implementasi kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa difokuskan pada peran dan program-program yang dilaksanakan oleh kelompok PKK. Program PKK yang berhubungan langsung dengan langkah Pemerintah Desa dalam menerapkan kesetaraan gender yaitu program keluarga berencana dan stunting.

Implementasi kesetaraan gender di Desa Wukirsari juga sudah dilaksanakan tidak hanya oleh Pemerintah Desa melalui berbagai kebijakan dan programnya tetapi juga dari kesadaran masyarakatnya sendiri. Menurut Kasi Pemerintahan Desa Wukirsari, Ibu Suyarmi menuturkan bahwa kesetaraan gender di Desa Wukirsari sudah baik karena ada kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau menuturkan bahwa,

“Kalau masyarakat Wukirsari sudah mengetahuilah kalo wanita tidak harus jadi ibu rumah tangga, tidak. Sudah ada kesadaran dari pihak masyarakat, tidak ditekan perempuan harus dirumah, pendidikan juga harus tinggi dulu.”

Kemudian Bu Suyarmi juga menambahkan bahwa, “Untuk pendidikan sudah mengikuti perkembangan zaman lah, karena kalau orangtuanya mampu pasti ya anak akan disekolahkan. Tetapi itu yang sekarang tidak minat itu anaknya. Kalau orang tua memberi itu sekolah yang tinggi, tetapi anaknya itu yang tidak mau. Dari Pemerintah Desa itu sudah melaksana sosialisasi pendidikan. Sosialisasi ini bertujuan supaya masyarakat berpendidikan tinggi tidak hanya SMP putus. Kemudian ada juga sosialisasi terkait narkoba intinya pendidikan. Sosialisasi ini dari Kabupaten kemudian disampaikan Ketua PKK melalui pertemuan rutin RT.”²⁰

¹⁹ M. Sulistiono, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2024, wawancara 1, transkrip.

²⁰ Suyarmi, wawancara oleh penulis, 30 Januari 2024, wawancara 6, transkrip.

Berdasarkan keterangan Bu Suyarmi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Wukirsari telah mengimplementasikan kesetaraan gender dalam kehidupan baik pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan. Mereka sudah menyadari pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki khususnya dalam bidang pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung implementasi kesetaraan gender. Namun, minat anak-anak dalam menempuh pendidikan hingga kejenjang yang lebih tinggi mulai berkurang. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, sosialisasi terkait pendidikan penting dilakukan untuk meningkatkan motivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anaknya. Sosialisasi disampaikan melalui pertemuan rutin RT karena diharapkan bahwa penyuluhan tersebut sampai secara langsung kepada masyarakat dan dapat segera terealisasi.

Implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender juga dengan strategi pada bidang ekonomi. Melalui wawancara, Pak Ali selaku yang bertanggungjawab memaping sektor ekonomi menuturkan bahwa,

“Dalam sektor industri kreatif dan pertanian kita menjalin relasi dengan pihak lain, banyak. Sebenarnya kalo kita akses banyak ya kemarin kita bersama dengan BPD Kayen. Dari Kayen itu kalo ngga salah itu Sundoluhur, nah itu mereka mempunyai akses juga untuk kegiatan itu. Misalnya dengan BPD maitan itu kita sudah bersepakat itu kalo mau bikin kegiatan konveksinya. Itukan apa namanya, tinggal bagaimana membuat MoU nya. Cuma biasanya kendala, kita disini siyap karena menerima suatu program, yang memberi program biasanya kurang begitu siyap karena mungkin tidak yakin juga gitu. Jadi, pendalaman kerjasamanya belum terlalu serius ya. Ada itu kemarin produknya Mojomulyo itu yang batik, itukan itu juga menginginkan suatu pemasaran. Misalnya, kemarin Sinom itu juga punya produk untuk dipasarkan jadi saling ini. Kalo isalnya dibawah itu ada produk dinaikkan ke gunung, kalo di gunung ada prroduk kebanyakan penghasilan apa kayak singkongnya, kayak pisang yang kemarin disoroti kalo dari gunung

itu pisang. Itu banyak banget itu dikirim saja tapi tidak di jadikan produk olahan jadi. Itukan nilai tambahnya kurang. Sebetulnya kalo diproduksi disini ya bagus. Harga pisang di Wukirsari itukan tidak stabil karena tidak ada industrinya. Seharusnya ini dapat dijalankan oleh perempuan-perempuan karenakan dari laki-lakinya banyak yang merantau.”²¹

Berdasarkan pernyataan Pak Ali, dapat diketahui bahwa kerjasama dalam bidang ekonomi dapat memberikan dampak yang positif dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjual mentah hasil pertanian yang melimpah yang harganya tidak stabil, tetapi mampu mengolah menjadi produk yang lebih bernilai jual tinggi. Industri kreatif dan sektor pertanian juga dapat dilaksanakan tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki. Ketika perempuan dapat memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tempat tinggalnya hal itu dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan desa.

Berdasarkan data-data di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pelaksanaan PUG dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara aktif dilakukan oleh PKK dan BPD melalui kegiatan Musrembangdes. Kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender seperti pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan selalu diadvokasikan untuk menjadi salah satu program Pemerintah Desa dalam anggaran tahunan Desa. PKK dan BPD juga memaksimalkan penyaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan yang dilaksanakan per RT pada setiap awal bulan. Pemerintah Desa Wukirsari menampung berbagai masukan dalam musrembagdes, tetapi tidak semua masukan dapat diimplementasikan dalam RAPBDes (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) karena anggaran masih fokus pada pembangunan infrastruktur dan belum ada sosialisasi terkait program PUG baik dari Pemerintah Kabupaten maupun Kecamatan.

²¹ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Gender Equality melalui Advokasi Pelaksanaan PUG dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Wukirsari

Dalam implementasi *gender equality* atau kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender, ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya yaitu:

a. Faktor Pendukung

1) Upaya Pemerintah Desa dalam Implementasi Kesetaraan Gender

Implementasi kesetaraan gender di Pemerintahan Desa Wukirsari dapat terlaksana salah satunya karena telah terdapat program SDGs Desa. Bapak Sulistiono memaparkan bahwa,

“Pelaksanaan SDGs kemarin itu setelah beberapa bulan ada program terkait SDGs yang berupa pendataan bantuan-bantuan oleh BPD dan Kaur Pemerintahan.”²²

Berdasarkan pada pernyataan Bapak Sulistiono dapat diketahui bahwa program SDGs yang telah dilaksanakan merupakan realisasi dari SDGs poin pertama dan kedua yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Sasaran dari program bantuan ini juga mengimplementasikan kesetaraan gender di mana baik laki-laki maupun perempuan berkesempatan sama dalam menerima bantuan ini apabila memenuhi syarat salah satunya sebagai warga miskin.

Kemudian implementasi kesetaraan gender dapat dilaksanakan dengan baik menurut Bapak Sigit memaparkan bahwa,

“Dalam mendukung kesetaraan gender Pemerintah Desa berupaya saat ini menghidupkan kegiatan anggaran supaya PKK, kegiatan-kegiatan pokja PKK bisa berjalan dengan baik tentunya untuk menghidupkan ibu-ibu per RT, sekarang kan per RT ada kegiatan arisan ada kegiatan ibu-ibu itukan termasuk upaya dari desa. Ini masuknya

²² M. Sulistiono, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2024, wawancara 1, transkrip.

APBDes upaya dari desa untuk melaksanakan PUG.²³

Berdasarkan keterangan dari Bapak Sigit, Pemerintah Desa mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam implementasi kesetaraan gender dengan memberikan anggaran terhadap program kerja (pokja) yang diselenggarakan oleh PKK. Kemudian Pemerintah Desa juga mengupayakan supaya diskusi rutin yang dilaksanakan oleh ibu-ibu per RT disetiap bulannya dapat terus berjalan dengan memberikan dana dalam APBDes.

Sependapat dengan pernyataan di atas terkait dengan peran Pemerintah Desa dalam mendukung kesetaraan gender, Bapak Ali juga menyatakan bahwa, “Untuk mewujudkan kesetaraan gender di desa sudah kita upayakan ya sudah kita dorong. Satu, ada kelompok ibu-ibu PKK, itu jelas itu mendukung. Terus kedua ada kelompok rt nan, itu juga baru karena kita dorong karena supaya ada pelibatan perempuan. Kemudian, kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus misalnya itu lomba-lomba kita bagi ada yang, misalnya voli ya. Ada yang voli putra, ada juga voli putri. Jadi, memang mereka terlibat betul jadi porsi nya itu seimbang antara kegiatan laki-laki dan kegiatan perempuan. Malah kalo dikegiatan itu malah yang paling banyak malah didominasi perempuan kalo sekarang. Karena memang yang kelompok laki-laki biasanya tidak banyak yang dirumah karena perantauan ya. Karena itu sudah kita apa namanya itu termasuk bagian analisis yang sudah dikerjakan pemerintah desa untuk membagi kelompok itu, makanya ada kelompok PKK. Kelompok PKK memang wajib kalo yang

²³ Sigit Yekti Pasetyo, wawancara oleh penulis, 27 Januari, 2024, wawancara 3, transkrip.

terbaru itu kelompok RT. Kelompok RT ya itu terlibat sekali itu, itu termasuk trobosan.”²⁴

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Ali dapat diketahui bahwa implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pembinaan terhadap PKK dengan mengupayakan trobosan-trobosan baru, seperti rutinan kelompok RT. Selain itu, Pemerintah Desa khususnya BPD mendorong untuk melibatkan perempuan dalam berbagai sektor salah satunya dalam kegiatan tahunan di Desa seperti perlombaan HUT RI 17 Agustus. Perempuan juga dilibatkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan utama seperti lomba voli antar RT. Hal ini menjadi bukti bahwa advokasi pengarusutamaan gender terus dilakukan oleh BPD untuk membuat berbagai trobosan yang dapat mendukung implementasi gender di Desa Wukirsari.

Sependapat dengan Bapak Ali, Bapak Sulistiono juga memaparkan bahwa, “Peran perempuan juga sangat penting dalam sektor ekonomi, kalau untuk dana, lebih ke tenaga. Karna memang kalo untuk dana kita harus tau sumbernya juga dari mana. Kalau untuk dana mungkin dicari oleh kelompok nya masing-masing. Kalo yang saya lihat itukan per RT untuk perbulan iuran sekian. Untuk kebutuhan pokok dan segala macam, sehingga ketika ada kegiatan tidak narik lagi. Memang kebanyakan kalo untuk yang organisasi kemsyarakatan atau lingkungan itu kemajuan RT RW itu manufer ibu-ibu. Karena kalo yang bapak-bapak kan ngga mikirin yang penting iuran uang aja kan aman. Kalo untuk bapak-bapak kan kumuplan per RT jarang sekali, kebanyakan ibu-ibu yng menjadi manufers kegiatan, kalo bapak-bapak kan jarang. Delapan puluh persen kegiatan di desa yang menjalankan ibu-ibu, dan jarang sekali bapak-

²⁴ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

bapak ada kumpulan per RT. Kegiatan ibu-ibu di desa memang masih dalam skala kecil, tapi banyak kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya kegiatan ibu-ibu ini juga akhirnya saling kenal satu sama lain antar dukuh akan memperat persatuan sebagai orang Desa Wukirsari. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan PKK juga seringkali mengajak pemuda untuk berpartisipasi sehingga pemuda memiliki inisiatif dalam mengelola keberlanjutan di desa. Karena anak-anak mudalah yang nantinya sebagai penerus untuk kemajuan desa.”²⁵

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Sulistiono membuktikan bahwa keterlibatan perempuan memiliki peran penting dalam ikut memajukan potensi desa. Program-program dalam PKK juga berjalan dengan lancar karena dukungan dari masyarakat khususnya perempuan yang secara kolektif dalam merealisasikan program PKK.

2) Partisipasi perempuan Desa

Upaya Pemerintah Desa bersama dengan BPD dan PKK dalam pengarusutamaan gender mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat, terutama kaum perempuan. Perempuan di Desa Wukirsari berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di Desa. Hal ini disampaikan oleh Bu Ismowati bahwa:

“Perempuan-perempuan desa dari mulai remaja hingga ibu-ibu kalau saya lihat sudah mulai ada kesadaran terkait gender ya mbak. Mereka sudah ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti lomba voli setiap 17 Agustus dan acara sedekah bumi. Kemudian kalau kegiatan rutin RT setiap bulan juga sudah berjalan. Untuk bapak-bapak juga mendukung

²⁵ M. Sulistiono, wawancara oleh penulis, 26 Januari, 2024, wawancara 1, transkrip.

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu.”²⁶

Berdasarkan pernyataan Bu Ismowati, dapat dilihat bahwa faktor pendukung implementasi kesetaraan gender yaitu adanya partisipasi aktif perempuan desa dalam berbagai kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Selain itu, masyarakat juga sudah memiliki kesadaran kesetaraan gender di mana pada setiap kegiatan dan program desa perempuan dan laki-laki saling mendukung dan bekerjasama dalam pelaksanaannya. Para suami tidak menuntut istri-istri hanya untuk di rumah, tetapi sudah mendukung untuk ikut kegiatan publik.

b. Faktor Penghambat

1) Kesenjangan Pendidikan Masyarakat

Implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender dalam Pemerintahan Desa Wukirsari juga tidak selamanya dapat berjalan dengan lancar karena adanya berbagai tantangan. Menurut Pak Ali menuturkan bahwa,

“Potensi perempuan dalam ekonomi desa, untuk potensi waktu kita kemarin ya di 2021 itu kita sudah mapping bahwa keterlibatan perempuan sangat bagus. Cuma belum tergarap ya, belum tergarap oleh Pemerintahan Desa karena keterlibatan perempuan itu misalnya untuk produk industri kreatif. Itukan sebenarnya bisa dikerjakan perempuan. Cuma memang karena belum terbiasa mereka perempuan-perempuan ini, banyak mengerjakan pekerjaan disektor pertanian. Padahal kalau sektor pertanian kan pekerjaannya kan sebenarnya musiman saja. Kalau yang bersifat harian kan sebenarnya kan produk industri kreatif. Itu sudah pernah diwacanakan di mapping lah ya tapi belum bisa termaksimalkan ya karena ya tadi, antara pendidikan yang satu dan yang lain itu berbeda, sehingga itu menjadi problem juga

²⁶ Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

untuk menjadikan potensi itu bagus. Kemudian potensi yang lain dibidang misalnya budaya. Seni budaya terus kemudian itu kan bisa ditampilkan show-show anak-anak kita yang punya talenta, itu belum termaksimalkan. Dibidang olahraga itu juga banyak talenta-talenta. Dibidang akademis misalnya itu juga banyak juga yang belum terserap. Waktu kita mapping itu persoalan-persoalannya sebenarnya adalah di pengambilan kebijakan dan ketersediaan anggaran. Karena memang anggarannya tidak banyak jadi tidak bisa menyentuh sektor itu. Masih terfokus di pembanguna fisik ya infrastruktur kan fisik.”²⁷

Berdasarkan keterangan Pak Ali dapat dilihat bahwa faktor penghambat dari implementasi kesetaraan gender, khususnya dalam bidang ekonomi dan pendidikan adalah karena mayoritas perempuan di Desa Wukirsari hanya mengandalkan sektor pertanian, dan tidak memiliki skil dalam Industri kreatif. Kurangnya anggaran untuk mendukung potensi-potensi perempuan dan anak-anak juga menjadi salah satu faktor penghambat implementasi kesetaraan gender. Selain itu, adanya kesenjangan pendidikan juga menyebabkan perempuan tidak dapat mengerjakan beberapa sektor pekerjaan yang bisa dilakukan laki-laki, begitupula dengan sebaliknya ada sektor yang tidak bisa dikerjakan laki-laki.

“Faktor penghambat dalam implementasi kesetaraan gender ada yang pertama tingkat pendidikan ya karena pendidikannya tidak sama. Kalau mau meengadakan suatu kegiatan yang lebh serius ya, namanya kegiatan kan kalo yang kegiatan seneng-seneg misalnya lomba itu masih bisa semua terlibat tapi kalo misalnya kegiatan lebih serius pelatihan peningkata apa, itu kan karena gendernya tidak merata nah itu kesulitan. Pelatihan pembuatan

²⁷ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

kue , kan tidak semua suka kue, itukan kesulitan-kesulitan. Pelatihan misalnya, kemarin kita bikin pelatihan untuk peternakan. Yang bisa terlibat kan laki-laki krena setelah ditawar-tawarkan tidak ada itu perempuan untuk ikut. Ya itu kesulitan-kesulitan karena memang, satu memang tidak merata pendidikannya, terus yang kedua kewilayahan. Itu juga menjadi faktor penghambat, misalnya dukuh sini penduduknya pendidikan seperti ini, wilayah ini seperti ini. Jadi, juga susah untuk kita bikin kegiatan. Biasanya kalo kita rapat-rapat di desa yang selalu misalnya melibatkan gender itu bisanya itu. Paling yang bisa dilibatkan kegiatan yang seneng-senang kalo yang lebih serius itu agak sulit. Karena nanti sudah tersaring lagi , nah itu seperti itu. Untuk penghambatnya tidak meratanya ya, tidak merata tingkat pendidikannya.”²⁸

Berdasarkan keterangan tambahan Bapak Ali, ditekankan bahwa faktor pendidikan begitu penting dalam mendorong implementasi kesetaraan gender. Kesenjangan pendidikan menyebabkan masyarakat tidak dapat mengikuti setiap pelatihan yang diadakan Pemerintah Desa. Hal ini menyebabkan hanya beberapa orang yang dapat merasakan atau mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut. Pelatihan-pelatihan tersebut juga seakan mengelompokkan bahwa ada pelatihan hanya untuk perempuan dan pelatihan hanya untuk laki-laki.

2) Sosialisasi PERBUP Pati Nomor 82 Tahun 2020

Faktor penghambat implementasi kesetaraan gender juga berasal dari kurangnya sosialisasi peraturan pengarusutaman gender. Bapak Sigit memaparkan bahwa,

“Kalau dari desa anggaran untuk PKK itu ditahun 2023 belum ada untuk pelatihan. Anggaran PKK tahun 2023 itu hanya untuk ATK, terus untuk perjalanan dinas antara

²⁸ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

kecamatan dan untuk kegiatan rapat PKK. Baru tahun 2024 ini nanti PKK dianggarkan untuk pelatihan snack dan makanan ringan. Kemudian terkait dengan pengarusutamaan gender juga tiak bisa maksimal dan tidak ada program kerja yang khusus membidangnya. Soalnya PERBUP juga belum disosialisasikan dari tingkat kecamatan. Jadi dari desa ya belum ada untuk mensosialisasikan atau melaksanakan kebutuhan tentang PUG ini jadi tidak ada, untuk saat ini belum ada.”²⁹

Berdasarkan pemaparan Bapak Sigit, dapat diketahui bahwa sosialisasi terkait PUG dalam PERBUP Pati Nomor 82 Tahun 2020 belum disosialisasikan ke desa, sehingga terkait teknis pelaksanaan PUG yang sesuai peraturan juga belum dapat direalisasikan oleh Pemerintah Desa.

Selaku ketua PKK, Ibu Ismowati juga ikut menambahkan bahwa kesetaraan gender penting untuk diaktualisasikan, tetapi sebagai PKK juga memiliki keterbatasan wewenang dalam hal tersebut. Bu Ismowati mengatakan bahwa,

“Pelaksanaan kesetaraan gender di Desa Wukirsari begitu penting mbak. Cuma kalo di desa masyarakatnya ya masih sepeti itu, tapi sudah banyak perangkatnya sudah ada dari yang wanita jadi perangkat desa. Tetapi kalau peranya itu kok kayaknya masih belum maksimal seperti itu. Tetap masih dibedakan antara laki-laki dan perempuan, masih ada ketimpangan itu. Sebenarnya kalo di pemerintah sudah ada program pengarusutamaan gender tersebut, terus saya berfikir kalau hanya dilaksanakan oleh atau melalui PKK tetap tidak akan maksimal, kadang bingung itu kita melaksakannya di desa itu kaitan saya dengan PKK, PKK kan tetap ke ibu-ibu. Kalau ada program itu masuk ke PKK tidak akan maksimal. Karena PKK itukan tetap

²⁹ Sigit Yekti Pasetyo, wawancara oleh penulis, 27 Januari, 2024, wawancara 3, transkrip.

kaitannya dengan wanita, anak, seperti keluarga. Kalau dipemerintahan desa mungkin bisa lebih maksimal, kalo di PKK itu kan ya, termasuk kelompok RT itu implementasinya hanya pada ibu-ibu sewajarnya.”³⁰

Berdasarkan keterangan Bu Ismowati tersebut dapat dilihat bahwa masih ada beberapa masyarakat yang tidak memahami terkait pentingnya kesetaraan gender. Selain itu, wewenang PKK juga dinilai tidak dapat melaksanakan pengarusutamaan gender secara maksimal dikarenakan keanggotaan PKK adalah ibu-ibu pada umumnya.

3) Pendanaan yang terbatas

Pelaksanaan PUG di Desa Wukirsari juga tidak dapat terlaksana secara maksimal karena pendanaan dari Pemerintah Desa yang terbatas. Hal ini disampaikan oleh Bu Ismowati bahwa:

“Terkait dana untuk PKK memang terbatas mbak, karena untuk kebutuhan infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya. Biasanya dari beberapa desa di kecamatan ada yang bertanya terkait dana kita, nah kalo kita itu hanya sekitar 4 juta, kalo desa lain bisa sampai 15 juta mbak. Jadi kita kalau mau mengadakan kegiatan yang lebih besar itu ya itu terkendala didananya. Kalau mau mengadakan pelatihan-pelatihan itu juga kan butuh sarana prasarana. Saya itu sudah mengusulkan pelatihan katering sejak 2021 dan baru tahun 2024 ini bisa dianggarkan.”³¹

Berdasarkan keterangan Bu Ismowati dapat diketahui bahwa, untuk memberdayakan perempuan di Desa Wukirsari, PKK tidak memiliki dana yang cukup banyak dibandingkan desa lainnya. Kendala dalam dana ini menyebabkan beberapa kegiatan yang mendukung produktivitas perempuan Desa tertunda bahkan tidak adapat direalisasikan. Hal ini tentu

³⁰ Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

³¹ Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

membuat Bu Ismowati dan anggota PKK terus mendorong Pemerintah Desa untuk memberikan anggaran pada pelatihan-pelatihan usaha. Pada tahun 2024 ini ada pelatihan yang akhirnya direalisasikan oleh Pemerintah Desa yaitu pelatihan catering.

C. Analisis Data

1. Analisis Implementasi Gender Equality dalam Program dan Kebijakan Pemerintah Desa Wukirsari

Kesetaraan gender memiliki makna mengimplementasikan persamaan keadaan terhadap perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan serta hak sebagai manusia supaya dapat berpartisipasi dan ikut terlibat dalam ruang-ruang publik serta menikmati hasil yang sama atas pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual yang merujuk pada perspektif bahwa laki-laki dan perempuan harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi yang berdasarkan pada jenis kelamin, kecuali adanya alasan biologis yang memerlukan perlakuan berbeda.³²

Kesetaraan gender juga berupa tidak adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang bersifat struktural, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender juga akan menciptakan keadilan gender sehingga menghapuskan standarisasi peran, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Terealisasinya kesetaraan dan keadilan gender ditunjukkan dengan ketiadaan bentuk-bentuk diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka mempunyai akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta mendapatkan manfaat yang sama dan adil dari pembangunan.³³ Implementasi kesetaraan gender juga sudah diterangkan dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 97 dengan jelas Allah memberikan kesempatan yang sama untuk menghormati laki-laki dan perempuan dalam beramal sholeh. Perilaku dan tindakan kebaikan tentu tidak terbatas hanya dalam ruang

³² Sulistyowati, "KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL."

³³ Hasibuan, Harahap, and Utomo, "KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN."

domestik tetapi meliputi perilaku yang bersifat publik atau umum.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah SWT. memberikan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakannya.³⁴

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Adapun dalam Surah Az-Dzariyat ayat 56 yang menjelaskan terkait penciptaan manusia, di mana dalam surah itu kata ‘manusia’ menandakan bahwa Allah SWT. tidak membedakan makhluknya termasuk jenis kelamin.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Kemudian pada Surah Al-An’am ayat 165, Allah SWT. menerangkan bahwa tugas manusia adalah menjadi khalifah dimuka bumi. Allah SWT. tidak menyebutkan jenis kelamin

³⁴ Nurjan, Dr. Syarifan, M.A., Dr. Muhamad Uyun, “Analytical Studies on Gender Equality in Quran.”

hamba-Nya yang menjadi khalifah.³⁵

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

Artinya: “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan surah-surah diatas dapat diketahui bahwa Allah dalam firmanNya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ayat Al-Qur’an Surah An-Nahl ayat 97 dijelaskan bahwa dalam beramal sholeh Allah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam Surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa Allah SWT. memberikan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan tanpa membedakannya. Surah Az-Dzariyat ayat 56 yang menjelaskan terkait penciptaan manusia (baik perempuan maupun laki-laki) untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Surah Al-An’am ayat 165 yang menerangkan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi tanpa menyebutkan laki-laki atau perempuan.

Implementasi *gender equality* atau kesetaraan gender dalam program dan kebijakan Pemerintah Desa Wukirsari berdasarkan keterangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan PKK sudah terlaksana, tetapi masih belum maksimal. Kuota perempuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih di bawah minimal kebijakan afirmasi, di mana hanya ada 2 (dua) perangkat desa perempuan dari 11 perangkat desa. Akan tetapi, peran perempuan dalam ranah publik menurut Bapak Suyikno sudah berpartisipasi aktif dengan keikutsertaan perempuan menjadi anggota KPPS. Sependapat dengan Bapak Suyikno, Bapak Sigit juga menjelaskan bahwa dalam proses rekrutmen perangkat desa tidak ada peraturan pengarusutamaan gender yang memberikan syarat kuota

³⁵ NF/NKM, “Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Alquran.”

perempuan. Sehingga pemilihan perangkat desa berdasarkan seleksi pendaftar yang kebetulan didominasi laki-laki. Meskipun demikian, perangkat desa perempuan memiliki peran dalam bidang tertentu yang membutuhkan perempuan seperti kegiatan sosialisasi stunting dan posyandu.

Menurut keterangan Bapak Sigit selaku Sekertaris Desa, Pemerintah Desa tidak memiliki program yang secara spesifik menaungi bidang pengarusutamaan gender. Akan tetapi, dalam setiap pelaksanaan program pemerintahan, Pemerintah Desa berupaya untuk mengimplementasikan kesetaraan gender. Setiap program dan kebijakan desa, Pemerintah Desa memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk ikut terlibat aktif dalam menyelenggarakan program-program di desa. Sehingga, program-program yang dibuat Pemerintah Desa dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun secara nyata beberapa program Pemerintah Desa yang merealisasikan implementasi kesetaraan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari antara lain:

a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

Implementasi kesetaraan gender salah satunya direalisasikan pada program Pos Kesehatan Desa (PKD). Kegiatan PKD di Desa Wukirsari dilaksanakan oleh PKK bersama dengan bidan desa. PKD memiliki beberapa kegiatan diantaranya yaitu posyandu balita, penanganan stunting, posyandu lansia, dan pembinaan calon pengantin. Dalam pembinaan calon pengantin, PKK bersama bidan desa memberikan arahan terkait tugas istri dan suami. Calon pengantin juga diberikan arahan terkait program sebelum menikah seperti imunisasi. Mereka juga diberikan pengetahuan terkait pentingnya program keluarga berencana termasuk pada calon pengantin di bawah umur.

Melalui kegiatan PKD ini juga Pemerintah Desa dan PKK melakukan berbagai sosialisasi kepada masyarakat seperti sosialisasi untuk memotivasi pendidikan, sosialisasi terkait narkoba, dan sosialisasi pemanfaatan limbah rumah tangga. Menurut Bu Ismowati sosialisasi ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan sosial. Terutama dalam hal pendidikan, karena masih banyaknya pernikahan dini dan kasus putus sekolah di Desa Wukirsari.

Peningkatan pendidikan diharapkan dapat mengikis budaya patriarti yang menganggap pendidikan terutama untuk perempuan itu tidak penting.

b. Penyelenggaraan Festival Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa

Sejak 2021, Pemerintah Desa Wukirsari sudah mulai membuat kebijakan untuk mengikutsertakan perempuan kedalam kegiatan-kegiatan desa seperti karnaval, sedekah bumi, dan perayaan HUT 17 Agustus.³⁶ Selain menjadi panitia, perempuan juga sudah mulai dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan didalamnya. Selain itu mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan inovasi-inovasi dalam kegiatan di desa salah satunya dalam festival kepemudaan dan olahraga. Dalam festival ini ada berbagai perlombaan dan karnaval.

Dalam bidang olahraga yaitu ada kegiatan lomba voli antar wilayah RT. Pada setiap wilayah RT akan ada perwakilan dari tim laki-laki dan tim perempuan. Selain itu, juga ada kegiatan karnaval di mana setiap wilayah RT biasanya akan diminta untuk membuat kreasi dari sampah. Pelaksanaan karnaval tidak hanya dilaksanakan oleh perempuan, tetapi laki-laki juga ikut andil dalam pembuatan kreasi sampah. Kemudian juga ada kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh masyarakat di Desa Wukirsari. Kegiatan-kegiatan ini selain sebagai bentuk implementasi gender juga untuk mepererat persatuan masyarakat Desa Wukirsari.³⁷

Pada kegiatan sosial kebudayaan yaitu festival kepemudaan dan olahraga, para suami mendukung istri dan anak perempuannya 100% untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keterangan dari Bapak Ali dan Ibu Ismowati bahwa partisipasi ibu-ibu dalam kegiatan tersebut lebih besar dan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Berdasarkan keterangan dari Ibu Suyarmi juga mengatakan demikian, bahwa masyarakat khususnya kaum laki-laki sudah menyadari bahwa tugas perempuan atau istri tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja.

³⁶ Hasil observasi di Kantor Desa Wukirsari, 23, Mei, 2024.

³⁷ Hasil observasi di Kantor Desa Wukirsari, 23, Mei, 2024.

c. Pembinaan PKK

Pemerintah Desa memberikan anggaran kepada PKK di tahun 2024 untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan dalam mendukung sektor ekonomi desa. Pelatihan-pelatihan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga dengan meningkatkan keterampilan dan produktivitas perempuan. Dalam program PKK salah satunya ada kegiatan rutin RT. Rutinan RT merupakan kegiatan yang beranggotakan semua perempuan di wilayah RT. Kegiatan ini diadakan sebulan sekali atau lebih ketika ada kegiatan-kegiatan besar di Desa.

Rutinan RT bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor yaitu politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan. Diadakannya kegiatan rutin RT dapat mempermudah suatu kebijakan dan program baik dari tingkat Desa maupun sampai tingkat Kecamatan, Kabupaten akan sampai tepat sasaran kemasyarakatan. Pembinaan PKK ini juga sebagai bentuk penerapan SDGs Desa poin kelima yaitu melibatkan peranan perempuan desa sebagai bentuk implementasi kesetaraan gender.

Kegiatan rutin RT ini juga membuat PKK menambah jumlah keanggotaannya, yang semula hanya 15 orang menjadi 10 orang. Penambahan anggota PKK ini bertujuan supaya ada perwakilan perempuan dalam setiap wilayah RT dalam Penyelenggaraan Pemerintahna Desa. Dengan demikian, informasi dari Pemerintah Desa juga akan lebih cepat sampai dan diterima oleh masyarakat. Perempuan Desa juga bisa dengan mudah untuk menyampaikan aspirasinya dalam kegiatan Rutinan RT.

Kegiatan PKD, festival kepemudaan dan olahraga, serta pembinaan PKK sebagai bentuk advokasi pengarusutamaan gender di Desa Wukirsari. Advokasi dipakai sebagai alat dalam strategi transformasi dalam mewujudkan suatu tujuan. Advokasi memiliki peran sebagai media yang dipakai untuk mewujudkan tujuan tertentu secara sistematis dan terorganisir untuk memengaruhi suatu kebijakan publik supaya diubah atau berubah secara bertahap dan maju. Advokasi dalam institusi pemerintah dapat berbentuk kunjungan, diskusi,

audiensi hingga *judicial review*.³⁸ Pelaksanaan advokasi pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas perempuan dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam langkah pengarusutamaan gender (PUG) Bapak Ali selaku BPD Desa Wukirsari melakukan upaya dengan mendorong dalam setiap kegiatan di Desa ada keseimbangan perempuan dan laki-laki dalam kepanitiannya dan pelaksanaannya. Meskipun demikian, peran perempuan terkendala dalam keikutsertaannya dibidang pembangunan fisik. Karena pelaksana pembangunan biasanya didominasi oleh laki-laki yang fisiknya lebih kuat. Selain itu Bapak Ali selaku BPD juga melakukan mapping untuk menjaring aspirasi-aspirasi masyarakat. Penjaringan ini dilaksanakan melalui 2 metode yaitu online dan offline. Masyarakat dapat memberikan aspirasinya melalui website BPD yang telah disediakan. Kemudian melalui offline, masyarakat dapat langsung menemui anggota BPD berdasarkan wilayah kerjanya.³⁹ Penjaringan dengan 2 metode tersebut diharapkan dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat tanpa ada kesenjangan.

Bapak Ali juga mendorong peran perempuan dalam pelaksanaan BUMDes sebagai pelaksana usaha-usaha dalam BUMDes. Perempuan dinilai lebih ulet dan rajin jika dibanding dengan laki-laki. Selain itu, karena tidak ada kewajiban menafkahi keluarga, perempuan khususnya ibu rumah tangga dapat memperoleh upah sebagai pengelola BUMDes untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan desa juga diupayakan Bapak Ali melalui industri kreatif. Melihat desa-desa tetangga yang sudah melaksanakan industri rumahan seperti konveksi dan pengelolaan makanan, Desa Wukirsari juga diharapkan memiliki industri demikian. Akan tetapi, pelaksanaan industri kreatif di Desa Wukirsari menemui banyak kendala.⁴⁰

³⁸ Naila Syafa'ah, "Advokasi: Peran Organisasi Perca Indonesia Mengatasi Permasalahan Keluarga Perkawinan Campuran (Studi Di Kantor Organisasi Perca Pasuruan Jawa Timur)."

³⁹ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

⁴⁰ Ali Syarifudin, wawancara oleh penulis, 28 Januari, 2024, wawancara 4, transkrip.

Masyarakat lebih memilih menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka dalam bentuk bahan mentah (*raw food*). Hal ini karena dinilai lebih praktis untuk memperoleh penghasilan, padahal harga dalam bentuk bahan mentah tidak menentu. Selain itu, pemasaran produk juga lebih mudah dalam keadaan mentah daripada sudah diolah, karena adanya persaingan produk-produk makanan ringan. Masyarakat Desa Wukirsari terutama ibu rumah tangga dan remaja sebenarnya banyak yang sudah melaksanakan industri kreatif konveksi, tetapi mereka hanya sebagai buruh bkan sebagai pemilik. Hal ini diharapkan suatu saat dapat diubah, di mana ada warga Desa Wukirsari yang memiliki usaha konveksi. Bapak Ali sudah mengupayakan untuk melatih masyarakat sebagai pengelola konveksi, tetapi langkah kerjasama dengan beberapa desa masih belum menemukan kesepakatan.

Sependapat dengan Bapak Ali, Bu Ismowati selaku ketua PKK juga mengusulkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas perempuan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Salah satunya yaitu mengadakan pelatihan catering. Pelatihan catering diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perempuan desa sebagai salah satu bentuk inovasi usaha. Melihat kebutuhan catering dalam berbagai kegiatan di Desa begitu tinggi, setidaknya kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh masyarakat sendiri, bukan dari desa lain. Selain itu berdasarkan keterangan Bu Ismowati, dari PKK juga pernah beberapa kali mengadakan pelatihan-pelatihan seperti eco enzym dan eco print. Namun, pelatihan ini hanya berjalan sekali dan tidak ada keberlanjutan. Hal ini sangat disayangkan karena memiliki potensi ekonomi yang cukup bagus jika ada keberlanjutan.⁴¹

Kemudian menurut pernyataan Bapak Sigit, peran perempuan dalam inovasi program di Desa juga terlihat dari kegiatan pengelolaan sampah. Beberapa wilayah RT sudah melaksanakan proses pemilahan sampah. Sampah dapur yang bersifat anorganik ini kemudian dijual kepada pengepul. Hasil penjualan kemudian dimasukan ke dalam kas RT. Hal ini bertujuan untuk membentuk kemandirian RT dalam keuangan, sehingga ketika ada kegiatan tidak ada penarikan iuran kepada masyarakat. Jadi, implementasi kesetaraan gender di Desa

⁴¹ Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

Wukirsari diberbagai program dan kegiatan Desa dapat meningkatkan potensi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Desa melalui kemandirian ekonomi.

Berdasarkan analisis program desa di atas dapat dilihat bahwa dukungan laki-laki atau suami terhadap partisipasi istri dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan pembangunan masih 50%. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pandangan bahwa perempuan tidak dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, peran perempuan dalam bidang politik juga masih dalam lingkup diskusi di lingkungan RT dan keanggotaan PKK. Kemudian dalam bidang ekonomi, sebagian besar perempuan berprofesi sebagai buruh tani, petani, hingga bekerja di konveksi yang ada di desa sebelah. Ibu-ibu belum memperoleh dukungan dari suaminya untuk mendirikan industri kreatif seperti industri makanan ringan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Gender Equality melalui Advokasi Pelaksanaan PUG dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Wukirsari

Implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender di Desa Wukirsari dapat terlaksana secara berkelanjutan karena adanya antusias masyarakat terutama perempuan dalam program dan kegiatan di desa. Perempuan sudah berani tampil dalam publik seperti pada kegiatan musrembangdes. Mereka sudah berani menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya.⁴² Keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor terutama dalam ekonomi juga memiliki potensi yang besar. Adapun faktor pendukung implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender di Desa Wukirsari yaitu:

- a. Partisipasi aktif perempuan Desa dalam melaksanakan kegiatan dan program Desa. Perempuan di Desa Wukirsari sudah secara aktif dan kolektif berpartisipasi dalam kegiatan sedekah bumi, hari kemerdekaan, dan hari perayaan lainnya. Perempuan desa ikut terlibat secara aktif di dalam kegiatan tersebut baik sebagai panitia maupun peserta. Partisipasi aktif perempuan ini juga didukung oleh kesadaran masyarakat terkait kesetaraan gender yang mulai meningkat.

⁴² Ismowati, wawancara oleh penulis, 29 Januari, 2024, wawancara 5, transkrip.

- b. Dukungan dari Pemerintah Desa seperti Kepala Desa dan BPD yang terus mendorong untuk keseimbangan partisipan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan Desa. Pemerintah juga mengoptimalkan supaya berbagai kegiatan dan program desa dapat dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali. BPD dan PKK juga paling vokal dalam mengusulkan berbagai program-program desa yang mencerminkan kesetaraan gender seperti pelatihan-pelatihan, sosialisasi, peningkatan ekonomi melalui industri kreatif, dan keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan BUMDes

Advokasi memiliki arti membela yang disebarluaskan di masyarakat, media, bahkan kalangan pergerakan. Advokasi dipakai sebagai alat dalam strategi transformasi dalam mewujudkan suatu tujuan. Advokasi bukan berarti membenarkan yang salah, tetapi menempatkan masalah hak dan kewajiban dalam kebenaran dari yang telah diberikan oleh pemerintah. Advokasi mengharapkan terjadinya perubahan yang meliputi aspek perubahan tindakan dan sifat, transformasi dalam sistem kerja, dan prosedur dalam masyarakat atau lembaga.

Aktualisasi implementasi kesetaraan gender melalui advokasi pengarusutamaan gender di Desa Wukirsari telah diupayakan oleh berbagai pihak agar terealisasikan semaksimal mungkin. Meskipun demikian, masih mendapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat implementasi kesetaraan gender antara lain:

- a. Kuota perangkat desa perempuan sendiri yaitu masih belum memenuhi kuota 30% keterlibatan perempuan. Perangkat desa di Desa Wukirsari terdiri dari 2 perangkat perempuan dan 9 perangkat laki-laki. Selain itu, peran strategis juga didominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari struktur Pemerintah Desa di mana satu perangkat perempuan sebagai Kasi Pemerintahan dan satu perangkat perempuan hanya sebagai perangkat pembantu urusan TU dan umum.⁴³
- b. Sosialisasi terkait PERBUP Pati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender juga belum disampaikan ke desa terutama terkait Pasal 17. Pasal tersebut

⁴³ Hasil observasi di Desa Wukirsari, 23, Januari, 2024

menjelaskan tugas Bupati untuk melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) salah satunya yaitu menetapkan panduan teknis pelaksanaan PUG pada skala Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang belum sampai ke desa, dan anggaran desa yang masih fokus pada pembangunan infrastruktur.

- c. Kesenjangan pendidikan masyarakat. Adanya kesenjangan ini membuat beberapa program Desa hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Hal ini karena tingkat pendidikan masyarakat yang mengalami kesenjangan, ada yang lulus hingga perguruan tinggi tetapi juga ada yang hanya tamat SD. Kesenjangan pendidikan ini juga membuat program-program pelatihan yang diselenggarakan Desa tidak dapat terlaksana secara optimal. Pelatihan-pelatihan biasanya hanya berjalan pada proses sosialisasi dan tidak ada berkelanjutan.
- d. Kurangnya dana untuk lembaga kemasyarakatan seperti PKK. Anggaran di Desa Wukirsari diprioritaskan pada pembangunan fisik, sehingga dana untuk PKK sangat minim. Kendala dana ini membuat program pemberdayaan PKK tidak dapat terealisasi.

